

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsumsi daging sapi di Indonesia cenderung meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapat per kapita, harga daging sapi dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian (2016), konsumsi daging sapi pada tahun 2015 mencapai 613,11 ribu ton, sementara produksi 506,66 ribu ton. Pemerintah memproyeksikan tingkat konsumsi daging pada tahun 2020 sebesar 2,38 kg/kapita/tahun, sehingga kebutuhan daging dalam negeri mencapai 644.73 ton dan rata-rata tingkat pertumbuhan konsumsi 1,33% per tahun (Pusdatin, 2016). Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan produksi yang memadai. Laju peningkatan populasi sapi potong relatif lamban, yaitu 1,96% selama kurun waktu 1984-2016 (Pusdatin, 2016).

Rendahnya laju pertumbuhan produksi daging sapi dalam negeri ini terkait erat dengan permasalahan pengembangan sapi potong di Indonesia, di antaranya: (1) usaha bakalan atau *calf-cow operation* kurang diminati oleh pemilik modal karena secara ekonomis kurang menguntungkan dan dibutuhkan waktu pemeliharaan yang lama, (2) adanya keterbatasan pejantan unggul pada usaha pembibitan dan peternak, (3) ketersediaan pakan tidak kontinu dan kualitasnya rendah terutama pada musim kemarau, (4) pemanfaatan limbah pertanian dan agroindustri pertanian sebagai bahan pakan belum optimal, (5) efisiensi reproduksi ternak rendah dengan jarak beranak (*calving interval*) yang panjang (Maryono *et al.* 2006), (6) terbatasnya sumber bahan pakan yang dapat meningkatkan produktivitas ternak dan masalah potensi genetik belum dapat diatasi secara optimal (Kariyasa 2005; Santi 2008), dan (7) gangguan wabah penyakit (Isbandi, 2004). Kondisi tersebut menyebabkan sumbangan sapi potong terhadap produksi daging nasional

rendah (Mersyah 2005; Santi 2008) sehingga terjadi kesenjangan yang makin lebar antara permintaan dan penawaran (Setiyono *et al.* 2007).

Dalam rangka peningkatan produksi, pendapatan peternak, dan pendapatan asli daerah, pemerintah telah mencanangkan Program Kecukupan Daging (PKD) semenjak tahun 2000. Namun program ini mengalami banyak kendala dan target yang diharapkan tidak tercapai. Kendala-kendala tersebut di antaranya (Tomatala, 2008) adalah: (1) konsumsi masyarakat terhadap daging cukup tinggi namun tidak diimbangi produksi yang mencukupi, (2) perilaku peternak yang sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental, (3) sumberdaya manusia peternak yang rendah (peternak tidak kreatif dan inovatif), (4) tingkat pendapatan yang masih rendah, (5) pengelolaan sumberdaya alam yang sangat terbatas dalam pengembangan usaha khusus untuk pengadaan ternak, (6) pemanfaatan lahan yang belum dilakukan sesuai dengan tujuan usaha, (7) peternak belum mampu memilih dan membaca peluang, (8) peternak belum berani mengambil resiko dengan pengambilan keputusan yang tepat, (9) akses informasi yang masih terbatas dan belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, (10) tenaga penyuluh yang belum berjalan secara efektif sesuai harapan, (11) sarana dan prasarana produksi usaha belum memadai dan (12) pengaruh nilai, sosial, dan budaya.

Dari kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen utama yang menjadi penyebab, yakni (1) kompetensi peternak rendah (kompetensi teknis dan kompetensi wirausaha), (2) keberdayaan peternak rendah dan (3) berbagai faktor internal dan eksternal sebagai pendukung utama dan penunjang dalam pengembangan usaha perlu mendapat dukungan dari berbagai unsur yang terkait. Kendala eksternal yang tidak kalah penting adalah berkurangnya areal penggembalaan, kualitas sumber daya rendah, akses ke lembaga permodalan sulit, dan penggunaan teknologi yang rendah (Rosida, 2006).

Mersyah (2005) mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan lambannya perkembangan sapi potong di Indonesia. *Pertama*, sentra utama produksi sapi potong di Pulau Jawa yang menyumbang 45% terhadap produksi daging sapi nasional sulit untuk dikembangkan karena: (1) ternak dipelihara menyebar menurut rumah tangga peternakan (RTP) di pedesaan, (2) ternak diberi pakan hijauan pekarangan dan limbah pertanian, (3) teknologi budi daya rendah, (4) tujuan pemeliharaan ternak sebagai sumber tenaga kerja, perbibitan (reproduksi) dan penggemukan (Roessali *et al.* 2005), dan (5) budidaya sapi potong dengan tujuan untuk menghasilkan daging dan berorientasi pasar masih rendah. Kedua, pada sentra produksi sapi di kawasan timur Indonesia dengan porsi 16% dari populasi nasional, serta memiliki padang penggembalaan yang luas, pada musim kemarau panjang sapi menjadi kurus, tingkat mortalitas tinggi, dan angka kelahiran rendah. *Kedua*, berkurangnya areal penggembalaan, kualitas sumber daya rendah, akses ke lembaga permodalan sulit, dan penggunaan teknologi rendah (Syamsu *et al.* 2003; Isbandi 2004; Ayuni 2005; Rosida 2006). Faktor pendorong pengembangan sapi potong adalah permintaan pasar terhadap daging sapi makin meningkat, ketersediaan tenaga kerja besar, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pengembangan sapi potong, hijauan pakan ternak dan limbah pertanian tersedia sepanjang tahun, serta usaha peternakan sapi lokal tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi global (Kariyasa 2005; Gordeyase *et al.* 2006; Rosida 2006; Nurfitri 2008).

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu sentra produksi daging sapi nasional (setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten), memiliki peran cukup penting dalam pasokan daging sapi secara nasional, kendatipun bukan termasuk sentra populasi sapi potong di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permintaan daging di Sumatera Barat cukup tinggi. Tambahan pasokan sapi dari luar Sumatera Barat mengimbangi tingginya permintaan daging sapi daerah ini, di samping ketersediaan sapi potong lokal. Potensi permintaan daging sapi yang relatif cukup besar

ini seharusnya diikuti oleh peningkatan populasi sapi yang di-usahakan oleh petani peternak di wilayah ini. Namun, pada kenyataannya laju per-tumbuhan populasi ternak sapi tidak seimbang dengan laju permintaan daging sapi.

Potensi ini harus dimanfaatkan untuk memberdayakan peternak di pedesaan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat *people-centred, equitably distributed and enviromentally and socially sustainable*. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep pembangunan yang berorientasi pertumbuhan di masa lalu.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah melalui pengembangan sistem agribisnis, karena mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Upaya ini sejalan dengan adanya gerakan revitalisasi menuju peningkatan penyediaan daging dalam negeri. Prospek pengembangan ternak sapi potong sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya laju pertumbuhan permintaan daging sapi yang belum mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi memegang peranan strategis.

Secara makro pertumbuhan penawaran daging sapi yang lebih lambat dari permintaan berkaitan dengan beberapa faktor seperti: penyebaran sentra produksi, jarak geografis antara sentra produksi dengan sentra konsumsi yang cukup jauh, infrastruktur transportasi yang terbatas dan kelembagaan. Pada tingkat mikro, sejumlah permasalahan yang pada usaha peternakan rakyat seperti: keterbatasan modal, rendahnya penguasaan teknologi, penyakit ternak dan kelembagaan (pada aspek pra-produksi, produksi dan pasca produksi). Selain itu, pola produksi belum

mencerminkan respon yang tepat terhadap pasar atau masih sering lebih berkaitan erat dengan aspek sosial budaya. Oleh karena itu, dalam pencapaian program kecukupan daging (terutama daging sapi) selain memfokuskan pada aspek teknis juga pada aspek nonteknis, seperti kelembagaan, yang dianggap sebagai salah satu aspek penentu peningkatan produksi dan produktivitas.

Salah satu aspek kelembagaan yang sudah lama diterapkan dan menjadi budaya dalam perekonomian pada usaha peternakan sapi adalah sistem bagi hasil, yang di Sumatera Barat dikenal dengan *saduoan*, di Jawa dikenal dengan *gaduhan*, di Jawa Barat dikenal dengan *paruhan*, dan di Sulawesi dikenal dengan *tengseng*. Bagi hasil secara teoritis merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* yang efektif di era otonomi daerah saat ini, karena model pembangunan ini didasarkan pada potensi dan kondisi *social fabric* komunitas setempat. Program pembangunan masyarakat yang didasarkan pada potensi dan komunitas masyarakat, tidak akan merubah konstruksi sosial serta nilai-nilai sosial yang berlaku, sehingga akan mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat karena sesuai kondisi budaya setempat.

Pembangunan pertanian di Sumatera Barat selama ini kurang menekankan pada kelembagaan lokal yang telah ada dan tidak dilakukan penguatan modal sosial masyarakat. Ketidak-berdayaan dalam memfungsikan kelembagaan lokal seperti sistem seduaan (*saduoan*) akan mengakibatkan ketidakberhasilan pengembangan agribisnis di perdesaan. Dampaknya adalah lembaga lokal petani di perdesaan tidak berdaya, sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat pendapatan para petani. Pemberdayaan kelembagaan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan yang akut antar golongan masyarakat.

Modal sosial yang berlaku dalam sistem bagi hasil (*saduoan*) di Sumatera Barat adalah saling percaya yang tinggi antar pemodal dan peternak. Norma sosial sangat dijunjung tinggi di

daerah ini sehingga bila terjadi penyimpangan dari norma-norma sosial, maka kontrol sosial dari masyarakat sangat berperan. Pelaksanaan sistem bagi hasil (*saduoan*) sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial kemasyarakatan yang tinggi. Sikap petani berkenaan dengan pengembangan agribisnis dalam sistem bagi hasil (*saduoan*) tergolong positif, karena perolehan modal yang paling mudah dan paling murah adalah melalui sistem bagi hasil ini. Oleh sebab itulah sistem bagi hasil (*saduoan*) di daerah ini tetap langgeng sejak dahulu kala.

Modal masih menjadi kendala utama di tengah masyarakat, kendatipun program yang dicanangkan oleh pemerintah maupun perbankan namun tetap saja belum mampu diakses dengan baik oleh masyarakat, karena persyaratan yang sangat ketat dan belum mampu dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Sistem bagi hasil usaha peternakan sapi dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permodalan yang sangat terbatas di tingkat peternak, sumber daya tenaga kerja yang berlebih, potensi hijauan pakan ternak yang tersedia, serta tidak cukupnya waktu bagi pemilik modal untuk menginvestasikan dananya di perdesaan. Keunggulan sistem bagi hasil adalah merupakan suatu sistem produksi dan pemasaran dimana terjadi pembagian beban risiko produksi dan pemasaran di antara pemilik modal yang umumnya berada di kota dan peternak kecil yang berada di pedesaan. Sistem ini dapat dilihat sebagai suatu terobosan untuk penyediaan sarana produksi (input, terutama sapi induk/bakalan) yang diperlukan peternak kecil.

Salah satu sumber modal yang paling mudah diakses oleh peternak adalah *saduoan* atau sistem bagi hasil. Sistem ini ternyata mampu bertahan dan tetap langgeng di tengah lingkungan ekonomi yang mengalami proses modernisasi yang pesat. Bahkan *saduoan* nampaknya lebih tangguh dari sistem kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang ditunjang oleh pemerintah. Sistem bagi hasil ini mengarah kepada kemitraan usaha, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013, kemitraan usaha adalah kerjasama yang saling

menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling membutuhkan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.

Sistem bagi hasil, yang merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha, dimaksudkan sebagai upaya pengembangan usaha yang dilandasi kerjasama antara pemodal dan peternak rakyat, dan pada dasarnya merupakan kerjasama vertikal (*vertical partnership*). Kerjasama tersebut mengandung pengertian bahwa kedua belah pihak harus memperoleh keuntungan dan manfaat (Mudikdjo dan Muladno 1999). Menurut Saptana *et al.* (2006), kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama berbagai pelaku agribisnis, mulai dari kegiatan praproduksi, produksi hingga pemasaran. Kemitraan dilandasi oleh azas kesetaraan kedudukan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan serta adanya persetujuan di antara pihak yang bermitra untuk saling berbagi biaya, risiko, dan manfaat (Widyahartono dalam Hermawan *et al.*, 1998).

Pengembangan usaha peternakan sapi potong di Sumatera Barat dengan sistem bagi hasil tradisional sudah sangat banyak dilakukan, bahkan di setiap daerah mempunyai nama dan sistem pembagian yang berbeda-beda, seperti di Pesisir Selatan, pembagian hasil mempunyai 3 jenis pembagian yaitu bila yang dibagi adalah turunan pertama jantan pembagian porsi yang diterima kedua belah pihak sama 50% dan 50%, bila anak betina dari turunan kedua, pemilik modal hanya menerima 25% saja. Sementara di Kabupaten Solok dikenal dengan nama *paduoi*, dengan norma yang berlaku dalam pembagian hasil 60% untuk peternak, 40% untuk pemodal, sedangkan di Kabupaten Tanah Datar dikenal dengan *saduoan*, dengan pembagian 50%, untuk kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil ini masih berjalan hingga sekarang. Pelaku sistem bagi hasil terdiri dari peternak dan pemilik modal yang saling bekerjasama dengan tujuan dapat memberi keuntungan antara kedua belah pihak, dimana lazimnya pe-milik modal menyerahkan modal berupa ternak sapi kepada peternak untuk dipe-lihara atau dikembangbiakkan dan kemudian pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Penerapan sistem bagi hasil melibatkan antara dua pihak yaitu antara pemberi modal dan peternak. Pihak yang memberikan modal merupakan pihak yang memiliki ternak sapi, akan tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara sapi tersebut, sehingga pemilik modal memberikan sapi tersebut kepa-da peternak untuk dipelihara sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang terbangun sebelumnya. Menurut peternak kesepakatan yang terbangun tidak dilaku-kan secara tertulis antara peternak dan pemilik modal, akan tetapi hanya mengede-pankan konsep kepercayaan atau kekeluargaan. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus, ada kalanya terjadi kecurangan oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian Ifandri 2016 menemukan bahwa sistem bagi hasil di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dikenal dengan sebutan *paduoi*, melibatkan pemodal dan peternak dengan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan secara tertulis hanya mengedepankan kepercayaan atau kekeluargaan. Pemeliharaan ternak dalam sistem *saduoan* yang dilakukan peternak secara intensif yang bertujuan untuk penggemukan dan semi intensif yang bertujuan untuk pembibitan. Beberapa kendala yang selalu dihadapi oleh peternak dan pemilik modal dalam sistem bagi hasil (*saduoan*) antara lain: (1) kecurangan pemeliharaan ternak yang dilakukan peternak dengan pemeliharaan secara semi-intensif, ketika ternak sapi dilepaskan yang seharusnya digembalakan disiang hari tetapi peternak hanya membiarkan ternak sapi berkeliaran bebas tanpa memberikan perawatan dan perhatian terhadap ternak sapi sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian pada ternak

ulah kejahatan manusia dan hewan buas, (2) Pembagian dalam sistem *paduoi* yang tidak adil. Melihat kondisi peternak pada umumnya masih awam dan tidak terlalu mengetahui tentang harga pasar maka sering terjadi ketidak jujuran pemilik modal, yang mana pemilik modal meletakkan modal awal terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya kepada peternak, (3) kematian pada ternak dalam sistem *paduoi*. Hal ini sangatlah merugikan peternak maupun pemilik modal.

Meskipun pada kenyataannya sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi yang sudah lama diadopsi masyarakat ini belum memberikan hasil yang optimal, baik dari sisi pemilik modal maupun dari sisi peternak karena rendahnya produktivitas, namun sistem bagi hasil ini tetap saja langgeng diterapkan masyarakat pedesaan. Fenomena ini menarik karena pada umumnya investasi berharap laba atau keuntungan, namun dengan rendahnya produktivitas dan jarak kelahiran sapi membuat investasi ini tidak terlalu menguntungkan dibanding berinvestasi pada usaha peternakan lainnya, seperti ayam broiler. Pertanyaannya adalah mengapa pemilik modal masih tetap mau melaksanakan bagi hasil dengan peternak yang rendah produktivitas usahanya. Apakah sistem bagi hasil efektif untuk tetap dipertahankan sebagai sumber modal yang dapat meningkatkan pendapatan petani/peternak? Keberhasilan usaha bagi hasil sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak yang bermitra dalam mengimplementasikan perjanjian tidak tertulis dalam melaksanakan sistem bagi hasil (*saduoan*) ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil (*saduoan*) usaha peternakan sapi di Sumatera Barat?
- (2) Apakah faktor-faktor yang mendorong petani/peternak maupun pemodal melaksanakan sistem bagi hasil (*saduoan*) dalam usaha peternakan sapi?

- (3) Apakah dengan melakukan sistem bagi hasil, petani/peternak lebih efisien dalam menggunakan faktor produksi, dan besaran *factor share* yang diterima masing-masing pelaku bagi hasil (*saduoan*)?
- (4) Apakah produktivitas, pendapatan dan kinerja usaha peternakan sapi sistem bagi hasil (*saduoan*) lebih tinggi dari kinerja usaha peternakan sapi mandiri? Dan apakah petani/peternak sapi sistem bagi hasil (*saduoan*) relatif lebih mendekati optimal dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki dibanding petani/peternak sapi mandiri dan bagaimana hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan petani/peternak?
- (5) Bagaimana efektivitas sistem bagi hasil (*saduoan*) dalam meningkatkan pendapatan peternak sapi dan pemodal di pedesaan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi petani/peternak dalam memilih dan melaksanakan sistem bagi hasil (*saduoan*) usaha peternakan sapi, yang meliputi:

- (1) Mengidentifikasi pelaksanaan sistem bagi hasil (*saduoan*) usaha peternakan sapi di Sumatera Barat
- (2) Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mendorong petani/peternak maupun pemodal untuk melaksanakan sistem bagi hasil (*saduoan*) usaha peternakan sapi dan juga untuk melihat hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil *saduoan* ini.
- (3) Menganalisis perbedaan efisiensi dalam menggunakan faktor produksi dan tenaga kerja antara petani/peternak sapi sistem bagi hasil (*saduoan*) dan petani/peternak sapi mandiri, termasuk mengetahui besarnya *factor share* yang diterima masing-masing pelaku bagi hasil
- (4) Menganalisis optimalisasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki petani/peternak

sistem bagi hasil (*saduoan*) dan usaha mandiri serta bagaimana hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan petani/ peternak

- (5) Menganalisis efektivitas sistem bagi hasil usaha peternakan sapi dalam meningkatkan pendapatan peternak dan pemodal di pedesaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- (1) Menjelaskan gejala-gejala ekonomi usaha peternakan sapi yang merupakan akibat dari keputusan agregat individual pada struktur kelembagaan bagi hasil (*saduoan*) yang berlaku, yang lebih menekankan kepada pendekatan analisis ekonomi kelembagaan (*institutional economic analysis*).
- (2) Bagi pelaku sistem bagi hasil (petani/peternak dan pemodal), pada kondisi dimana bagi hasil merugikan, maka informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini berguna sebagai pegangan dalam memilih bentuk hubungan transaksi tanah-tenaga kerja yang dapat meningkatkan kinerja usaha peternakannya.
- (3) Implikasi dari temuan hasil penelitian ini diharapkan akan dapat mendorong upaya menemukan kebijaksanaan yang dapat menciptakan prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk mengurangi aspek merugikan bagi hasil dalam upaya mewujudkan ketersediaan daging sapi secara nasional.
- (4) Tambahan informasi bagi peneliti lain yang menaruh minat pada masalah sistem bagi hasil usaha peternakan sapi.

1.5. Unsur Kebaharuan Penelitian/Novelty

Berdasarkan studi literatur yang ada, belum ada penelitian sebelumnya yang mengangkat topik persediaan (bagi hasil) khususnya yang terjadi di Sumatera Barat pada usaha sapi potong

dengan pendekatan modal sosial dan ekonomi kelembagaan. Riset sebelumnya hanya berorientasi hasil berdasarkan penghitungan analisis usaha sederhana dengan menghitung pendapatan saja, tidak menghitung biaya transaksi yang terjadi pada saat kegiatan perseduaan berlangsung disamping biaya produksi, sehingga ditemukan bahwa perseduaan tidak menguntungkan baik bagi peternak maupun pemilik modal.

Beberapa penelitian yang membahas tentang bagi hasil tradisional di Indonesia antara lain Penelitian Sri Ulfa Sentosa (2001) lebih banyak membahas bagi hasil lahan pertanian (*sakap/land tenure*) tanaman padi sawah dan dihubungkan dengan distribusi pendapatan (indeks gini) di antara pemilik dan penyakap, tidak melihat bagaimana sistem bagi hasil menjadi langgeng dari sudut pandang Modal sosial (Social Capital) dan ekonomi kelembagaan, dimana *factor share* menjadi tolok ukur keberlanjutan bagi hasil ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Simatupang dkk (1993) yang mengkaji sistem gaduhan (kelembagaan peternakan) sapi potong. Variasi hasil yang diperoleh karena perbedaan harga, *share* yang diterima para pelaku sistem gaduhan tersebut. Hasil penelitian Keban dkk (1999) di Pulau Timor dan Nono (2000) di Pulau Sumba berupa studi kasus berbagai model gaduhan (sistem bagi hasil) juga memperlihatkan adanya variasi/perbedaan pendapatan yang diterima pelaku (pemodal dan penggaduh). Pendekatan yang dilakukan oleh ketiga riset di atas yaitu pada usaha ternak sapi potong, adalah teori produksi, berupa analisa pendapatan dan pembagian hasil tanpa memperhitungkan biaya transaksi sebagai inti proses transaksi antar pemeran serta, maka hasil perhitungan pendapatan masih perlu dikoreksi.

Belum ada penelitian yang mengungkapkan efisiensi penggunaan faktor produksi dan efektifitas kelembagaan bagi hasil *Saduoan* ini terhadap peningkatan pendapatan peternak. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas perseduaan sapi potong yang sangat mengakar dalam

kehidupan masyarakat Sumatera Barat sebagai suatu modal sosial terhadap pengembangan agribisnis peternakan, yang dilihat dari prespektif ekonomi kelembagaan. Penelitian ini juga melihat seberapa besar kekuatan modal sosial *Saduoan* ini memotivasi atau mendorong peternak dan pemodal untuk bekerjasama dalam meningkatkan pendapatan. Terakhir penelitian ini juga mengungkapkan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja usaha Peternakan Sapi potong yang diusahakan dengan kemitraan Saduoan.

